

ABSTRAK

Aksi unjuk rasa, yang sering disebut dengan "demo," merupakan gerakan protes yang dilaksanakan oleh sekelompok orang di ruang publik. Unjuk rasa ini biasanya digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat kelompok tersebut atau sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pihak tertentu. Selain itu, unjuk rasa juga bisa menjadi alat tekanan politik bagi kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Brimob menangani aksi unjuk rasa di wilayah hukum Surakarta serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan oleh satuan komando Brimob dalam menangani aksi unjuk rasa di wilayah tersebut.

Metode penelitian mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta menyelidiki data yang telah diperoleh. Metode ini memberikan gambaran tentang langkah-langkah dan prosedur yang diikuti dalam penelitian, termasuk waktu pelaksanaan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yang memadukan aspek hukum dengan kondisi sosial. Peneliti melakukan wawancara dan observasi untuk menggali lebih dalam mengenai proses dan peran Brimob dalam menangani unjuk rasa di wilayah Surakarta, menguraikan data yang diperoleh dari lapangan secara rinci terkait dengan kegiatan, prosedur, tahapan, alasan, dan interaksi yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anarkisme merupakan filosofi politik yang mengadvokasi masyarakat tanpa negara atau sering diartikan sebagai institusi sukarela yang mengatur dirinya sendiri. Beberapa penulis mendefinisikan anarkisme sebagai institusi yang lebih spesifik berdasarkan asosiasi bebas yang non-hierarkis. Konsep anarkisme berpendapat bahwa keberadaan negara tidak diinginkan, tidak perlu, atau bahkan berbahaya. Selain itu, anarkisme menolak otoritas atau organisasi hierarkis dalam segala bentuk interaksi manusia, sehingga penolakannya tidak terbatas hanya pada sistem negara.

Kata Kunci: Aksi Unjuk Rasa, Penegakan Hukum, Anarkisme